

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pemerintah pusat dalam usaha peningkatan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah dengan meningkatkan kegiatan investasi baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan menetapkan beberapa Kawasan Strategis Nasional yang dapat dijadikan sebagai roda penggerak ekonomi nasional maupun daerah.

Letak Kabupaten Karimun yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat strategis untuk dijadikan Kawasan Perdagangan Bebas dan/atau Pelabuhan Bebas sehingga menarik beberapa investor untuk berinvestasi di Karimun.

Dengan ditetapkannya Kabupaten Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan/atau Pelabuhan Bebas, yaitu suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai yang dijelaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi pada kawasan tersebut, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun mengadakan beberapa kegiatan, salah satunya yaitu pembangunan jalan di KPBPB Karimun (Jalan Pesisir Selatan dan Jalan Pesisir Utara). Pembangunan infrastruktur jalan sangat diperlukan untuk aksesibilitas dan mobilitas pada kawasan tersebut.

Menurut Hartanto dan Mulyono (2018), untuk mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima, sistem manajemen mutu pada pelaksanaan jalan sangat penting dan wajib diterapkan pada pelaksanaannya sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. Pelayanan jalan yang andal adalah pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimal, terdiri dari aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan

dan kecepatan tempuh rata-rata. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan jalaanan prima adalah selalu memberikan pelayanan yang optimal.

Sistem manajemen mutu dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara optimal. Beberapa kendala di lapangan seperti kurangnya pemahaman penyelenggara jalan terhadap sistem manajemen mutu yang tepat untuk memperoleh infrastruktur jalan yang kualitasnya baik. Selain itu, kontraktor pelaksana yang tidak taat pada penerapan sistem manajemen mutu seperti penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau peralatan yang digunakan tidak berfungsi dengan baik. Untuk meningkatkan kepatuhan kontraktor pelaksana terhadap penerepan sistem manajemen mutu, instruksi kerja sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pekerjaan jalan dapat dilaksanakan sesuai spesifikasi yang diisyaratkan. Penerapan sistem manajemen mutu pengawasan pekerjaan perkerasan aspal, memiliki peranan penting dalam pencapaian mutu konstruksi jalan (Hartanto dan Mulyono, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Adapun rumusan masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan sistem manajemen mutu pekerjaan pengaspalan?
- b. Apakah ketebalan lapis permukaan perkerasan jalan memenuhi Spesifikasi Bina Marga 2018 Revisi 2?
- c. Apakah kepadatan lapis permukaan perkerasan memenuhi Spesifikasi Bina Marga 2018 Revisi 2?

1.3 Lingkup Penelitian

Pengujian dilakukan pada proyek Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Di Kawasan PBPB Karimun yang berlokasi di Jalan Pesisir Utara, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dengan lingkup penelitian sebagai berikut:

- a. Proyek jalan ini merupakan kontruksi jalan perkerasan lapis lentur (*Flexible Pavement*)

- b. Lapis permukaan aspal yang digunakan yaitu jenis *Asphalt Concrete – Binder Course* (AC-BC) dengan tebal rencana 6 cm dan *Asphalt Concrete -Wearing Course* (AC-WC) dengan tebal rencana 4 cm.
- c. Pengambilan tebal sampel dilapangan dengan menggunakan pengujian *Core Drill Test*
- d. Pengujian Kepadatan aspal lapangan dilakukan di Laboraturium dengan menggunakan Metode AASHTO T 166

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu pekerjaan pengaspalan
- b. Mengevaluasi ketebalan lapis permukaan perkerasan jalan memenuhi Spesifikasi Bina Marga 2018 Revisi 2
- c. Mengevaluasi kepadatan lapis permukaan perkerasan memenuhi Spesifikasi Bina Marga 2018 Revisi 2

1.5 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang pelaksanaan pengendalian mutu proyek konstruksi pekerjaan jalan khususnya pekerjaan lapis permukaan perkerasan.
- b. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya mengenai pengendalian mutu proyek.